

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadiran Allah SWT serta atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Kota Batu Tahun 2018-2022 telah selesai disusun.

Renstra Kantor Kesbangpol ini telah menyesuaikan perubahan strategis organisasi, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan harapan *stakeholders*. Penyusunan renstra ini merupakan salah satu bentuk upaya implementasi visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, yang tertuang dalam RPJMD Kota Batu 2018-2022, yaitu **“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**, serta pokok-pokok pikiran misi pembangunan Kota Batu, khususnya misi ke-1, ***Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan Dan Kearifan Budaya Lokal.***

Renstra Kantor Kesbangpol Tahun 2018-2022 memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Di dalamnya tergambar tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, dan indikator pencapaian dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran. Sebagai dokumen perencanaan strategis, penyusunan Renstra ini juga mempertajam berbagai program dan kegiatan strategis diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Renstra ini merupakan wujud komitmen Kantor Kesbangpol dalam pembangunan kesatuan bangsa, politik.

Demikian Renstra Kantor Kesbangpol disusun, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kelancaran serta keberhasilan Kantor Kesbangpol dalam upaya mewujudkan masyarakat guyub rukun di Kota Batu.

Batu, Juni 2018

KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU

S U L I Y A N A H, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19630416 198603 2 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah... 6	
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	17
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD	21
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi.....	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	25
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	26
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	28
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.....	28

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	29
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	33
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	44
BAB VIII PENUTUP	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memenuhi ketentuan dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, disusun Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun 2018-2022, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun 2018-2022. Penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu Tahun 2018-2022, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur.

Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun 2018-2022 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2018-2022, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dalam melaksanakan program/kegiatan

pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan yang diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan

- Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
 12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur 2005-2025;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pemangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
 14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu;
 15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Batu;
 16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis daerah Kota Batu;
 17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu ini adalah :

Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam hal ini adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dalam menyusun program dan kegiatan pada periode tahun 2018-2022, dan dapat menjadi alat kontrol dan tolok ukur dalam menentukan efektifitas dan efisiensi suatu penyelenggaraan kegiatan.

Tujuan

1. Agar program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu tetap berkelanjutan, fleksibel dalam mengikuti tuntutan perubahan situasi dan kondisi yang ada.
2. Agar pelaksanaan setiap program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dalam mencapai tujuan organisasi selalu berpedoman pada Rencana Strategis yang mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Tupoksi yang telah ditetapkan. Sehingga kinerjanya dapat teratur.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD

- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
- 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi SKPD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

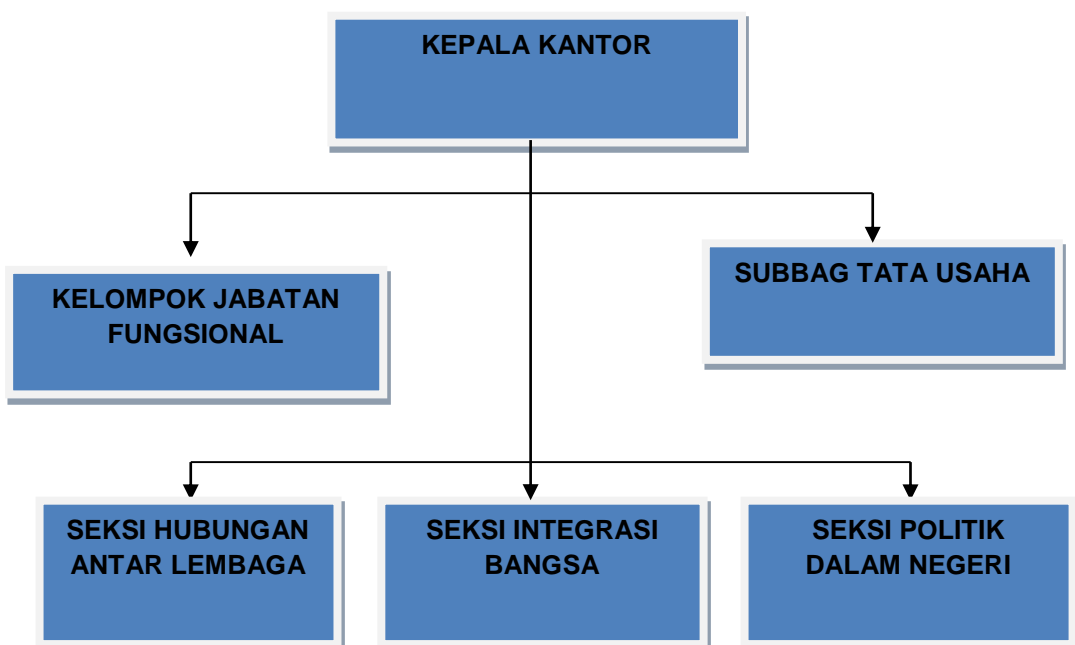
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu.

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU



Gambar 2.1 menunjukkan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Subag Tata Usaha;
3. Seksi Integrasi Bangsa;
4. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
5. Seksi Politik Dalam Negeri;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas merencanakan, merumuskan kebijakan, membina administrasi dan teknis, mengkoordinasikan, mengendalikan, serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis dan rencana kerja di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), penyusunan target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - c. perencanaan dan pengendalian anggaran;
 - d. pengendalian urusan administrasi kantor;
 - e. pembinaan hubungan antara lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat dengan pemerintah;
 - f. pembinaan penyelenggaraan upacara resmi dan upacara kenegaraan;

- g. pembinaan pembauran kebangsaan, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat;
- h. pengendalian proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
- i. pengendalian pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda);
- j. pengendalian hubungan antara partai politik dengan pemerintah;
- k. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama fasilitasi bidang kesatuan bangsa dan politik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait;
- l. pembinaan dan pengembangan;
- m. pengendalian dan evaluasi urusan hubungan antar lembaga dan Hak Asasi Manusia;
- n. pengembangan pendidikan politik di masyarakat;
- o. pencegahan dan penanganan konflik di masyarakat;
- p. pengendalian terhadap pelaksanaan dan kegiatan Kantor; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Tata Usaha

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaporan program dan kegiatan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kehumasan, kerumahtanggaan, dan perpustakaan, serta kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b. pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, rumah tangga serta perlengkapan kantor;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah di Kantor;
- f. pemrosesan ijin survey/penelitian;
- g. pengelolaan data informasi urusan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- h. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Sub Bagian; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Hubungan Antar Lembaga

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis di bidang hubungan antar lembaga kemasyarakatan di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pelaksanaan fasilitasi hubungan antara lembaga legislatif, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. pemrosesan rekomendasi pembentukan organisasi masyarakat dan organisasi non-politik;

- d. pendataan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- e. pemantauan kegiatan ormas/tokoh masyarakat/ tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
- f. pelaksanaan fasilitasi dan mediasi hubungan antar ormas/tokoh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan pemerintah;
- g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan lembaga nirlaba yang bermanfaat bagi masyarakat;
- h. pelaksanaan fasilitasi proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD;
- i. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Integrasi Bangsa

- (1) Seksi Integrasi Bangsa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis di bidang kewaspadaan dan integrasi bangsa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Integrasi Bangsa menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan daerah rawan konflik;
 - c. pelaksanaan analisis potensi konflik, penanganan konflik sosial dan rekonsiliasi serta rehabilitasi pasca terjadinya konflik sosial;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi komunitas intelejen daerah (kominda);
 - e. pemantauan dan pengawasan orang asing;

- f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang pembauran kebangsaan, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan di masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan upacara resmi dan upacara kenegaraan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pemberian tanda penghargaan pembauran kebangsaan;
- i. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan forum kewaspadaan dini masyarakat;
- j. pelaksanaan fasilitasi forum komunikasi dan konsultasi pembauran kebangsaan antar golongan, etnis, suku, serta antar umat beragama;
- k. peningkatan kapasitas aparatur di bidang pembauran bangsa, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Politik Dalam Negeri

- (1) Seksi Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis di bidang politik dalam negeri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kegiatan Seksi;
 - b. pendataan partai politik dan pembuatan peta politik;
 - c. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Desk Pilkada;
 - d. pelaksanaan fasilitasi, mediasi, dan komunikasi hubungan antara partai politik dengan pemerintah;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan etika politik di masyarakat;

- f. pelaksanaan pembinaan pendidikan Hak Asasi Manusia dan Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
- g. peningkatan kapasitas aparatur di bidang pendidikan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Seksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu terdiri dari sumber daya manusia dan aset atau modal. Sumber daya manusia terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berjumlah 20 (dua puluh) orang sedangkan tenaga honorer berjumlah 8 (delapan) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU

NO	NAMA/ TTL/ JENIS KELAMIN (L/P)		NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN
1	2		3	4	5
1	SULIYANAH, S.Sos	P	196330416 198603 2 017	Pembina Tk. I/ Ivb	Kepala Kantor
2	SRI WURYANTINI, S.Sos	P	19620116 199210 2 011	Penata Tk. I/ IIIId	Kasubbag TU
3	WENDY PRIANTA, SE	L	19781019 200604 1 004	Penata Tk. I/ IIIId	Kasi Hubungan Antar Lembaga
4	NURAINI	L	19640315 1986033 1 029	Penata/ IIIc	Kasi Integrasi Bangsa
5	DIAN SRI WIDOWATI, SE	P	19780424 200501 2 011	Penata Tk. I/ IIIId	Staf
6	MUHAMAD HAFIT, S. AP	L	19800108 200501 1 007	Penata Tk. I/ IIIId	Staf
7	DANNY ISLAM SOPHIA, S.IP	L	19741022 200903 1 002	Penata/ IIIc	Staf
8	SUMARNI, SE	P	19750924 201001 2 009	Penata Muda TK I/ IIIb	Staf
9	MOHAMMAD ERIK W, S.Kom	L	19820301 201001 1 015	Penata Muda/ IIIa	Staf
10	JOHANES SUGENG S, SH	L	19841225 201001 1 011	Penata Muda/ IIIa	Staf
11	UMAR MAKSUM, ST	L	19801014 201101 1 006	Penata Muda/ IIIa	Staf
12	ANDHIKA PUTRA BAKTI, S.IP	L	19870415 201101 1 006	Penata Muda/ IIIa	Staf
13	VIAN NIAGARA, S.Sos	L	19880429 201101 1 004	Penata Muda/ IIIa	Staf
14	ERVAN YUDHI SETIAWAN	L	19731217 200312 1 004	Penata Muda/ IIIa	Staf
15	DEDDY SETIAWAN	L	19740926201001 1 002	Penata Muda/ IIIa	Staf
16	EKO WAHYUDI	L	1980726 200701 1 002	Pengatur / IIc	Staf
17	YULI RIWAYATI	P	19780715 200801 2 035	Pengatur / IIc	Staf

18	OYANG TARAGA	L	19780715 200801 2 035	Pengatur / Iic	Staf
19	HARTATIK	P	19730606 201001 2 002	Pengatur Muda TK I/ Iib	Staf
20	DIAN EKA YUNIASTUTIK	P	19801227 201001 2 008	Pengatur Muda TK.I/ Iib	Staf

Tabel 2.2
DATA TENAGA HONORER KANTOR KESBANGPOL KOTA BATU

NO.	NAMA/ TEMPAT TGL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN
1	2	3	4
1	AGUS SETYAWAN Bangkalan, 17 Agustus 1983	L	SMU
2	IMAM TABRANI Sampang, 7 Desember 1981	L	S1
3	IWAN WAHYUDI SUPRAYITNO Malang, 18 September 1976	L	S1
4	MUHAMAD JUMARNO Malang, 11 Juli 1975	L	S1
5	EMALIA LISTYANINGTIAS S Malang, 15 Pebruari 1981	P	S1
6	SYAIFUL ANWAR Lamongan, 9 Juli 1979	L	S1
7	EKO SOEBEKTI Malang, 29 Oktober 1966	L	SMA
8	YETI SUKASIH Malang, 21 Januari 1975	P	S1

Sedangkan aset Kantor Kesbangpol Kota Batu bisa dilihat pada rincian berikut ini:

Tabel 2.3
**Daftar Aset Tetap Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik per
Desember 2017**

URAIAN	SALDO ASET (Rp)
ASET TETAP	
- Tanah	0,00
- Peralatan dan Mesin	877.365.445,00
- Gedung dan Bangunan	80.000.000,00
- Jalan, Jaringan dan Instalasi	0,00

- Aset Tetap Lainnya	2.849.000,00
- Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
- Aset Lainnya	7.262.000,00
JUMLAH ASET TETAP	967.476.445,00

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Presentase Kasus SARA yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
2	Presentase gangguan keamanan dan tindak kriminal yang tertangani			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	1	1	1	1
3	Presentase partisipasi masyarakat dalam PEMILU			80%	65 %	70 %	-	-	80 %	61 %	80,5 %	-	-	82 %	0,93	1,15	-	-	1,025
4	Presentase meningkatnya partisipasi masyarakat dan pelajar terhadap kegiatan-kegiatan berwasankebangsaan			100%	20%	40%	60%	80%	100%	19%	39%	59%	79%	100%	0,95	0,98	0,98	0,99	1

Batu, Mei 2018
Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

SULIYANAH, S.Sos
NIP. 19630416 198603 2 017

Tabel T-C.23.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran (17)	Realisasi (18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	4.362.229.517	5.334.872.811	5.117.002.710	7.407.287.680	6.806.885.029	3.928.965.039	5.150.696.193	4.771.395.686	7.030.187.211	6.001.773.464	0,9	0,96	0,93	0,94	0,88	14%	1,3%
Belanja Tidak Langsung	2.125.702.517	1.992.091.211	2.436.064.710	2.562.828.333	2.231.740.829	1.829.578.835	1.906.922.884	2.200.437.378	2.411.466.581	2.124.749.325	0,86	0,95	0,90	0,94	0,95	2,1%	0,4%
- Belanja Pegawai	2.125.702.517	1.992.091.211	2.436.064.710	2.562.828.333	2.231.740.829	1.829.578.835	1.906.922.884	2.200.437.378	2.411.466.581	2.124.749.325	0,86	0,95	0,90	0,94	0,95	2,1%	0,4%
Belanja Langsung	2.236.527.000	3.342.781.600	2.680.938.000	4.844.459.347	4.575.144.200	2.099.386.204	3.243.773.309	2.570.958.308	4.618.720.630	3.877.024.139	0,93	0,97	0,95	0,95	0,84	26%	2,2%
- Belanja Pegawai	784.675.000	986.020.000	974.400.000	1.198.079.000	1.024.425.000	717.403.400	970.885.000	953.023.750	1.147.384.000	937.437.000	0,91	0,98	0,97	0,95	0,91	8,2%	0,8%
- Belanja Barang dan jasa	1.391.452.000	2.281.083.100	1.706.538.000	3.555.559.140	3.537.619.200	1.324.515.304	2.201.711.209	1.617.934.558	3.384.108.805	2.929.601.149	0,95	0,96	0,94	0,95	0,82	37%	3,1%
- Belanja Modal	60.400.000	75.678.500	-	90.821.207	10.100.000	57.467.500	71.177.100	-	87.227.825	9.985.990	0,95	0,94	-	0,96	0,98	-16%	-1%
Total	4.362.229.517	5.334.872.811	5.117.002.710	7.407.287.680	6.806.885.029	3.928.965.039	5.150.696.193	4.771.395.686	7.030.187.211	6.001.773.464	0,9	0,96	0,93	0,94	0,88	14%	1,3%

*) diisi dengan nama Perangkat Daerah

***) disesuaikan dengan kewenangan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dalam 5 (lima) tahun kedepan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Batu, antara lain:

2.4.1 Tantangan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah Kota Batu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu menghadapi permasalahan dan tantangan baik pada aspek penguatan integrasi bangsa, politik dalam negeri, maupun aspek stabilitas keamanan dan ketertiban. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama lima tahun kedepan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun 2018-2022. Permasalahan-permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri selama lima tahun kedepan diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Aspek penguatan integrasi bangsa. Kota Batu sebagai daerah yang pluralis yang memiliki kemajemukan suku, budaya, ras dan agama merupakan kekayaan daerah yang harus dijaga dan dihormati. Pengelolaan kemajemukan yang baik merupakan tantangan dalam mempertahankan integrasi bangsa. Beberapa permasalahan yang akan dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dalam melaksanakan tugasnya dalam penguatan integrasi bangsa untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

- (a) Melemahnya wawasan kebangsaan, yang ditandai oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti nasionalisme dan wawasan kebangsaan.
 - (b) Masih adanya penggunaan cara-cara penyampaian pendapat yang mengabaikan/melecehkan simbol-simbol negara, bahkan ada yang cenderung anarkis dan serta masih adanya kecenderungan lebih mementingkan kepentingan kelompok dari pada kepentingan umum.
 - (c) Masih adanya potensi konflik vertikal, konflik horizontal yang bernuansa SARA, dan konflik politik. Selain itu, masih terdapat gejala politisasi nilai-nilai agama dan kepercayaan sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan.
2. Aspek politik dalam negeri. Tantangan yang dihadapi untuk mewujudkan sistem politik yang lebih demokratis adalah meningkatkan partisipasi rakyat yang lebih tinggi dalam kehidupan politik, dan membangun budaya politik yang demokratis, kuat dan efektif. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu pada kurun waktu lima tahun kedepan dalam pembinaan politik dalam negeri adalah:
- (a) Kurang berperannya kelembagaan politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.
 - (b) Penyelenggaraan pemilihan umum yang meskipun berjalan dengan lancar dan aman namun masih menyisakan berbagai persoalan, terutama mengenai daftar pemilih tetap dan penetapan hasil pemilihan umum.
 - (c) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu (PILGUB) ditandai dengan banyaknya Golput.

3. Aspek stabilitas keamanan dan ketertiban. Tantangan yang dihadapi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban adalah dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban. Permasalahan yang dihadapi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban Batu pada kurun waktu lima tahun kedepan adalah:
 - (a) Masih terdapatnya angka kriminalitas
 - (b) Aksi unjuk rasa

2.4.2 Peluang

Selain menghadapi permasalahan dan tantangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu juga memiliki peluang yaitu keberadaan kelembagaannya sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Peluang yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan peran dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Aspek penguatan integrasi bangsa. Integrasi bangsa sangat penting dalam upaya menjaga eksistensi bangsa. Oleh karena itu integrasi bangsa perlu dijaga dan ditumbuhkembangkan secara terus menerus. Dengan perannya dalam menjaga integritas nasional dan kesatuan bangsa, Kantor Kesatuan

Bangsa dan Politik Kota Batu memiliki peluang untuk melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan integrasi bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan nasional. Untuk itu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu melakukan upaya peningkatan wawasan kebangsaan.

- (a) Aspek politik dalam negeri. Sebagai pembina politik dalam negeri di Kota Batu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu melakukan upaya pemantapan stabilitas politik dalam negeri dengan melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat yang didukung oleh situasi dan kondisi yang kondusif. Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dapat melakukan upaya-upaya dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi serta pengembangan budaya politik baik kepada lembaga-lembaga politik maupun kepada masyarakat luas di Kota Batu.
- (b) Aspek stabilitas keamanan dan ketertiban. Sebagai peyelenggara untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Kota Batu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu melakukan upaya pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban. Untuk itu Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dapat melakukan upaya-upaya pencegahan tindak kriminal, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SOPD

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35 dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan
untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Munculnya Sikap intoleransi di tengah Masyarakat	Berkurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila	Kurangnya pembinaan wawasan kebangsaan di masyarakat
		Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan antar Ormas	Belum adanya kegiatan/aksi bersama sesama anggota Ormas
		Kurangnya saling menghormati dan menghargai antar kelompok masyarakat	Kurangnya Komunikasi dan Koordinasi antar kelompok masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih adalah:
Visi

**“DESA BERDAYA KOTA BERJAYA TERWUJUDNYA KOTA
BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL
YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Misi:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.
2. Meningkatkan Pembangunan Kualitas dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia.
3. Mewujudkan Daya Saing Perekonomian Daerah yang Progresif, Mandiri Berbasis Agrowisata.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur dan Kawasan Perdesaan Yang Berkualitas dan Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional.

Berdasarkan Visi dan Misi Walikota Batu tahun 2018-2022 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu akan mendukung terlaksananya visi dan misi Walikota terutama di *Misi Kesatu: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Berlandaskan Nilai Nilai Keagamaan dan Kearifan Budaya Lokal.*

Tujuan dari Misi Kesatu ini adalah:

- Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat guna mewujudkan batu kota nyaman

Sasaran dari Tujuan Misi Kesatu diatas adalah:

- Meningkatnya stabilitas kondisi sosial, ketertiban dan ketentraman wilayah

Indikator sasarnya adalah:

- Persentase Penanganan Potensi Kerusakan Bermotif SARA Yang Diselesaikan

Dalam mencapai misi tersebut Pemerintah Kota Batu melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1 Sosialisasi tentang Wawasan Kebangsaan dalam upaya meningkatkan Nasionalisme dan sebagai penangkal pengaruh paham yang bertentangan dengan ideologi pancasila.
- 2 Meminimalisir konflik SARA baik secara horizontal-vertikal.
- 3 Mewujudkan kerukunan umat beragama melalui program-program berkerjasama dengan FKUB, TOGA, TOMAS dan TODA.
- 4 Pendidikan Politik bagi pemilih pemula dan masyarakat Kader-kader Parpol melalui Sosialisasi pemilu ketika akan dilaksanakan pemilu (Pileg, Pilpres, dan Pemilukada).
- 5 Kapasitas aparat Kesbangpol mampu membaca perkembangan situasi khususnya cegah dan tangkal dini potensi ATHG
- 6 Mewujudkan kampung guyub rukun demi terciptanya kota batu yang aman dan nyaman.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Visi Kementerian Dalam Negeri “Mampu menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Dengan Misi :

- *Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri*
- *Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan*
- *Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat*
- *Mendorong terwujudnya keserasihan dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan*
- *Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik*

Dalam mendukung misi pertama yaitu : Memantapkan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri dan tujuan strategis : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta

karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara dengan sasaran strategis :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas

Serta dengan melihat Visi Gubernur Jawa Timur yaitu “*Terwujudnya Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan Berdaya Saing*” dengan Misi “*Makin Mandiri dan Sejahtera bersama wong cilik*” khususnya Tujuan Misi ke 5 yaitu : “*Meningkatkan Kesalehan Sosial dan Harmoni Sosial*” dengan fokus program sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama;
- Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman dan tertib;
- Meningkatkan penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM yang berkeadilan

Selaras dengan Perencanaan Strategis Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri serta Perencanaan Strategis Bakesbangpol Propinsi Jawa Timur maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu. mengimplementasikan dalam beberapa tujuan:

- Meningkatkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Batu sebagai kota wisata akan mengakibatkan banyaknya wisatawan dengan berbagai macam latar budaya berbeda yang berkunjung ke Kota Batu, sehingga di khawatirkan berdampak kepada kerukunan masyarakat Kota Batu maka perlu adanya pembinaan ditengah masyarakat untuk kembali menumbuhkan budaya rukun/toleransi.

Demikian pula untuk mencegah dan membentengi masyarakat dari pengaruh ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dibawa dari luar Kota batu, maka diperlukan pembinaan wawasan kebangsaan dan semangat nasionalisme.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama bagi kelangusngan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu upaya dan langkah untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa perlu senantiasa dilakukan secara dinamis berdasarkan perkembangan situasi yang dihadapi. Secara obyektif bangsa Indonesia dibangun berdasarkan kemajemukan sehingga berpotensi terhadap kerawanan sosial, politik dan kewilayahan yang dapat mengarah timbulnya konflik sosial yang berdimensi horizontal maupun vertikal. Selain kemajemukan masyarakat indonesia yang rawan konflik, masih terdapat beberapa permasalahan lainnya yang satu sama lain saling mengait seperti implementasi otonomi daerah yang belum tuntas, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi, serta rendahnya penegakan hukum dan kesadaran hukum yang merupakan hambatan yang signifikan bagi terwujudnya pemerintahan yang baik dan berpotensi terhadap disintegrasi bangsa, Disamping fenomena faktual tersebut di atas, kondisi kehidupan masyarakat masih dihadapkan pada kurangnya kesadaran demokrasi dan berpolitik serta kelestarian lingkungan sehingga berpengaruh terhadap semakin merosotnya indeks pembangunan manusia yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor ancaman dalam perwujudan ketahanan bangsa dan kehidupan masyarakat. Memperhatikan situasi yang berkembang dewasa ini di

Pemerintah Kota Batu dapat dikemukakan beberapa isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu, yaitu :

1. Masih adanya permasalahan-permasalahan Ipoleksosbud dan SARA yang bisa menjadi potensi konflik di masyarakat dan masih kurangnya penanganan dalam mencegah dan deteksi dini terhadap potensi konflik di masyarakat
2. Belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap keputusan 2 (dua) Menteri tentang Peraturan Bersama nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
3. Masih belum meratanya wawasan politik masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan berpolitik dan berdemokrasi yang sehat
4. Lunturnya pemahaman masyarakat tentang Wawasan Kebangsaan dan 4 pilar kebangsaan (ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhineka Tunggal ika dan NKRI)
5. Timbulnya paham-paham liberal dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menangkal adanya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap ipoleksosbud HanKam
6. Partisipasi masyarakat terkait keamanan lingkungan masih rendah

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel T-C.25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				5	6	7	8	9
1	Meningkatkan stabilitas kehidupan sosial masyarakat	Meningkatnya stabilitas sosial melalui keharmonisan umat beragama, suku, dan etnis	<i>Persentase Penanganan Potensi Kerusuhan Bermotif SARA Yang Diselesaikan</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, yaitu dari Tabel T-C.26.

Analisi SWOT

Kekuatan (Strenghts) :

1. Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;
2. Penyediaan Anggaran kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;
3. Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik;
4. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu;
5. Tersedianya Sumber Daya Manusia;
6. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral.

Kelemahan (Weaknesses) :

1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana Teknologi Informasi yang tersedia;
3. Peran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu secara mendasar belum menyentuh masyarakat sehingga perannya kurang di kenal Masyarakat;
4. Job Discription yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali over laping (tumpang tindih) dengan Badan/Dinas/Kantor lain.

Peluang (Opportunities)

1. Masih adanya kebutuhan Masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra struktur Politik dan Supra Struktur Politik, Wawasan Kebangsaan, Ketertiban/Ketentraman, Demokrasi dan HAM;
2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan demokrasi;

Ancaman (Treaths) :

1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD;
2. Keraguan Masyarakat terhadap netralitas seorang PNS;
3. Relatif tingginya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA

Berdasarkan analisa SWOT seperti tersebut diatas telah jelas, maka alternatif Strategi Kator Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Memanfaatkan loyalitas aparatur untuk menjalin kerja sama dengan instansi terkait baik di daerah maupun di pusat serta kerja sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda;
2. Meningkatkan tatanan kehidupan Masyarakat yang aman dan kondusif;
3. Memanfaatkan kualitas dan keahlian aparatur sesuai disiplin ilmu dan tupoksi masing – masing;
4. Meningkatkan ketersediaan data yang akurat;
5. Meningkatkan kompetensi aparatur;
6. Meningkatkan kenyamanan di lingkungan kerja;
7. Mengoptimalkan koordinasi dengan SKPD lain dan Pemerintah Pusat;
8. Meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan terhadap potensi instabilitas keamanan dan ketertiban umum serta bencana.

MATRIKS ANALISA SWOT

	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Walikota Batu Nomor 48 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu; 2. Penyediaan Anggaran kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu; 3. Adanya akses yang baik kepada infra struktur politik dan supra struktur politik; 4. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu; 5. Tersedianya Sumber Daya Manusia; 6. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah koordinasi lintas sektoral. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang belum optimal 2. Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia 3. Peran Kesbangpol secara mendasar belum menyentuh Masyarakat, Sehingga perannya kurang di kenal Masyarakat 4. Job Discirption yang kurang tepat dan kurang jelas yang sering kali overlapping (tumpang tindih) dengan Badan / Dinas /Kantor maupun Bagian
Peluang (O)	Pendorong (SO)	Status (WO)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kebutuhan masyarakat terhadap peran Pemerintah dalam pemberdayaan infra dan supra struktur politik, wawasan kebangsaan dan demokrasi 2. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan Demokrasi dan Penanggulangan Bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran dalam pemberdayaan infra dan supra struktur Politik, Wawasan kebangsaan, demokrasi dan HAM 2. Peningkatan kerja sama (fasilitasi) dengan Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi serta organisasi pengevaluasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sosialisasi eksistensi Kesbangpol Kota Batu melalui terobosan – terobosan strategi dengan melibatkan partisipasi infra dan supra struktur Politik. 2. Meningkatkan harmonisasi dan komunikasi sosial politik dengan elemen Masyarakat 3. Meningkatkan situasi dan kondisi yang kondusif di Kota Batu 4. Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM di Kota Batu

Ancaman (T)	Status QUO (ST)	Penghambat (WT)
1. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara Nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD 2. Keraguan masyarakat terhadap netralitas seorang PNS 3. Adanya potensi konflik di masyarakat (Vertikal, Horisontal dan SARA) 4. Kerawanan diakibatkan oleh pelaksanaan pilkada serentak baik secara politik maupun sosial 5. Berkembangnya paham radikalisme dan paham anti Pancasila	1. Melakukan kegiatan yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak 2. Meningkatkan peran dan fungsi sebagai pelayanan publik 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam angka pendidikan dan pembangunan di Bidang IPOLEKSOSBUD 4. Melakukan koordinasi dengan infra dan supra struktur Politik untuk mengatasi potensi konflik	1. Peningkatan kualitas SDM 2. Meningkatkan kewaspadaan dini dengan menggunakan akses dan koordinasi yang baik dengan infra dan supra struktur politik.

Tabel T-C.26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA		
MISI I	Meningkatkan stabilitas sosial, politik dan Kehidupan masyarakat yang Harmonis, Demokratis, Relegius dan Berbudaya berbasis nilai-nilai dan kearifan budaya local		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kerukunan dan kealitas kehidupan sosial masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui keharmonisan (toleransi) antar suku dan umat beragama disekitar tempat tinggal	1. Penguatan Ideologi Pancasila dan karakter bangsa 2. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas deteksi dini terhadap penanganan konflik sosial 3. Memanfaatkan loyalitas aparatur untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait baik di daerah maupun di pusat serta kerjasama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan dan pemuda 4. Peningkatan peran partai politik dan masyarakat melalui pendidikan politik	Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan masyarakat Meningkatkan pencegahan dan penanganan konflik sosial Menumbuhkan budaya toleransi antar kelompok masyarakat, yang mulai luntur dengan ditandai penolakan pendirian tempat pendidikan oleh kelompok tertentu. Meningkatkan Pemahaman Pendidikan Politik masyarakat

		5. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	terutama bagi perempuan dan pemilih pemula Melakukan pemberdayaan Ormas untuk meningkatkan peran Ormas dan melakukan pengawasan terhadap keberadaan Ormas
--	--	--	--

Tabel T-C.26 untuk menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T-C.27.

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Batu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2017)	Target Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir periode renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun -1		Tahun -2		Tahun -3		Tahun -4		Tahun -5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22
Meningkatkan Derajat Kerukunan dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum melalui keharmonisan antar suku, etnis dan umat beragama			Indeks Modal sosial			5.650.534.620		6.664.339.582		6.747.704.690		7.422.475.159		8.164.722.675		8.164.722.675		
				Persentase Penanganan Potensi Kerusuhan Bermotif SARAYang Diselesaikan	n/a	100%	5.650.534.620	100%	6.664.339.582	100%	6.747.704.690	100%	7.422.475.159	100%	8.164.722.675	100%	8.164.722.675		
			Program Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial	% Penanganan Konflik Sosial	n/a	-	-	100%	1.459.037.492	100%	1.604.941.241	100%	1.765.435.365	100%	1.941.978.902	100%	1.941.978.902	Integrasi Bangsa	Kota Batu
			Fasilitasi dan koordinasi Tim Kewaspadaan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan deteksi dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya	n/a	-	-	20 lap	521.923.050	30 lap	574.115.355	40 lap	631.526.891	50 lap	694.679.580	50 lap	694.679.580	Integrasi Bangsa	Kota Batu

		ATHG di daerah															
		Jumlah Laporan terkait pemantauan orang asing	-	-		20 lap		30 lap		40 lap		40 lap		20 lap			
	Fasilitasi dan koordinasi penanganan konflik sosial kota Batu	Jumlah rapat dan koordinasi Tim penanganan konflik sosial	-	-	-	2 lap	564.841.200	3 lap	621.325.320	4 lap	683.457.852	5 lap	751.803.637	5 lap	751.803.637	Integrasi Bangsa	Kota Batu
	Fasilitasi dan Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama	Jumlah Rapat Koordinasi forum kerukunan umat beragama	10 rakor	-	-	20 lap	197.628.750	30 lap	217.391.625	40 lap	239.130.788	50 lap	263.043.866	50 lap	263.043.866	Hunbungan Antar Lembaga	Kota Batu
	Fasilitasi dan koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan **)	Jumlah rrapat koordinasi dalam rangka menggalang keberagaman antar suku ras, dan etnis	10 rakor	-	-	20 lap	174.644.492	30 lap	192.108.941	40 lap	211.319.835	50 lap	232.451.819	50 lap	232.451.819	Hunbungan Antar Lembaga	Kota Batu
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan *)	% Deteksi dini kejadian ATHG yang ditindaklanjuti	n/a	100%	190.237.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu
	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) **)	Jumlah laporan deteksi dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah	10 lap	10 lap	190.237.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu
	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal *)	% Kejadian Konflik yang tertangani	n/a	100%	797.730.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu
	Peningkatan Deteksi Dini Melalui Aktivitas Intelijen Daerah (KOMINDA) **)	Jumlah laporan kejadian terkait IPOLEKSOSBUD	10 lap	10 lap	284.238.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu
	Tim Terpadu Penanganan	Jumlah rapat koordinasi	6 rakor	6 rakor	513.492.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu

	Konflik Sosial Kota Batu **)	Penanganan Konflik Sosial																
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	% Masyarakat yang memahami Wawasan Kebangsaan	n/a	20%	3.512.256.600	40%	3.971.239.140	60%	4.368.363.054	80%	4.806.199.359	100%	5.285.719.295	100%	5.285.719.295	Integrasi Bangsa	Kota Batu	
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan bagi pelajar dan masyarakat **)	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	500 org	500 org	97.960.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu	
	Peningkatan Bela Negara Melalui Pembentukan Paskibra Kota Batu **)	Jumlah anggota PASKIBRA yang siap melaksanakan tugas pada peringatan HUT RI	72 anggota	72 anggota	746.423.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu	
	Pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional **)	Jumlah upacara hari besar nasional yang terlaksana	5 upacara	5 upacara	703.625.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu	
	Pelaksanaan Rangkaian Upacara Hari-hari Tertentu **)	Jumlah upacara kenegaraan hari-hari tertentu yang terlaksana	6 upacara	6 upacara	681.924.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Integrasi Bangsa	Kota Batu	
	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan *)	% organisasi masyarakat yang mendapatkan pendidikan dan pembinaan nilai-nilai wawasan kebangsaan	n/a	-	338.430.220	100%	3.971.239.140	100%	4.368.363.054	100%	4.805.199.359	100%	5.285.719.295	100%	5.285.719.295	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu	
		% Kejadian konflik SARA yang tertangani	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan **)	Jumlah Rapat Koordinasi forum kerukunan umat beragama	10 lap	10 rakor	179.662.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu	
	Fasilitasi Penyelenggara Forum	Jumlah rapat koordinasi dalam rangka	10 lap	10 rakor	158.767.720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu	

			Pembauran Kebangsaan **)	menggalang keberagaman antar suku ras, dan etnis															
			Fasilitasi Pusat Pendidiksn Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	n/a	-	-	1000 org	107.756.880	1500 org	118.532.568	2000 org	130.385.825	2500 org	143.424.407	2500 org	143.424.407	Integrasi Bangsa	Kota Batu
			Peningkatan Aksi Bela Negara	Jumlah anggota PASKIBRA yang siap melaksanakan tugas pada peringatan HUT RI	n/a	-	-	144 anggota	2.452.926.740	216 anggota	2.698.219.414	288 anggota	2.968.041.355	360 anggota	3.264.845.491	360 anggota	3.264.845.491	Integrasi Bangsa	Kota Batu
				Jumlah upacara hari besar nasional yang terlaksana	n/a	-	-	22 upacara		33 upacara		44 upacara		55 upacara		55 upacara			
			Pelaksanaan Rangkaian Peringatan HUT Kemerdekaan RI	Jumlah rangkaian HUT RI yang terlaksana	n/a	-	-	18 rangkaian	1.410.555.520	27 rangkaian	1.551.611.072	36 rangkaian	1.706.772.179	45 rangkaian	1.877.449.397	35 rangkaian	1.877.449.397	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu
			Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas	Jumlah berkas pendaftaran Ormas yang diinput ke sistem melalui verifikasi Desk	n/a	-	-	15 berkas	12.639.000	20 berkas	13.902.900	25 berkas	15.293.190	30 berkas	16.822.509	30 berkas	16.822.509	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu
			Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Masyarakat yang memahami pendidikan politik	n/a	100 %	235.775.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Politik Dalam Negeri	Kota Batu
			Bimbingan Teknis Penyusunan, Pengajuan dan Pelaporan Bantuan Keuangan Parpol	Jumlah anggota parpol yang memahami tentang pertanggungjaban Banpol	45 org	45 org	37.599.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Politik Dalam Negeri	Kota Batu
			Penyuluhan Kepada Masyarakat **)	Jumlah masyarakat yang mendapatkan informasi yang berkaitan dengan politik	n/a	600 org	198.176.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Politik Dalam Negeri	Kota Batu
			Program Pemantapan dan Penguatan	Persentase penguatan dan pemberdayaan organisasi	100%	100%	576.105.300	100%	1.234.062.950	100%	774.400.395	100%	851.840.435	100%	937.024.478	100%	937.024.478	Politik Dalam Negeri	Kota Batu

		Kelembagaan Demokrasi	sosial masyarakat dan politik																	
		Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	n/a	-		800 org	850 org	900 org	950 org	950 org									
			Jumlah pemilih pemula yang mengikuti kegiatan pematapan etika budaya politik	n/a	-	-	150 org	255.993.600	-	175.000.000	-	192.500.000	-	211.750.000	-	211.750.000			Politik Dalam Negeri	Kota Batu
		Verifikasi Bantuan Dana Partai Politik	Jumlah berkas laporan pertanggungja waban BANPOL yang terverifikasi	n/a	-		18 lap	27 lap	36 lap	45 lap	45 lap									
			Jumlah Anggota parpol yang memahami tentang pertanggungja waban Banpol	n/a	-	-	45 org	108.450.650	90 org	119.295.715	135 org	180 org	131.225.287	144.347.615	180 org	144.347.615			Politik Dalam Negeri	Kota Batu
		Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik	Jumlah laporan geopolitik yang tersusun	n/a	1 lap		2 lap	3 lap	4 lap	5 lap	5 lap									
			Jumlah dokumen pelaporan hasil PEMILU	n/a	-	52.368.800	2 lap	495.146.000	-	67.091.750	-	73.800.925	-	81.181.018	-	81.181.018			Politik Dalam Negeri	Kota Batu
		Pembinaan, Pemberdayaan, dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah anggota Ormas yang diberdayakan untuk pengamanan pada kegiatan yang melibatkan masyarakat kota Batu	n/a	-		60 org	90 org	120 org	150 org	150 org									
			Jumlah anggota Ormas yang mendapatkan informasi UU Ormas	n/a	-	-	600 org	362.827.300	900 org	399.148.330	1200 org	1500 org	439.021.033	482.923.136	1500 org	482.923.136			Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu
			Jumlah dokumen laporan aktivitas ormas	n/a	-	-	2 lap		3 lap	4 lap	5 lap	5 lap								
		Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran	Jumlah berkas pendaftaran Ormas yang	n/a	-	-	15 berkas	20 berkas	25 berkas	30 berkas	30 berkas	12.639.000	13.902.900	15.293.190	16.822.509	16.822.509			Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu

			Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas	diinput ke sistem melalui verifikasi Desk																
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan **)	Jumlah berkas pengajuan BANPOL yang terverifikasi	9 lap	9 lap	60.992.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Politik Dalam Negeri	Kota Batu
			DESK Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **)	Jumlah dokumen pelaporan hasil Desk PEMILUKADA	1 lap	24 pemantauan dan 1 lap	121.411.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kota Batu
			Fasilitasi Pelayanan Pendaftaran Ormas dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas	Jumlah berkas pendaftaran Ormas yang diinput ke sistem melalui verifikasi Desk	n/a	10 berkas	11.490.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu
			Sosialisasi Peraturan Perundangan Organisasi Kemasyarakatan **)	Jumlah anggota Ormas yang mendapatkan informasi UU Ormas	-	300 org	91.204.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu
			Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan untuk Mengoptimalkan Pemeliharaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa **)	Jumlah anggota Ormas yang diberdayakan untuk pengamanan pada kegiatan yang melibatkan masyarakat kota Batu	-	30 org	186.639.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu
			Fasilitasi TIM Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan **)	Jumlah dokumen laporan aktivitas ormas	n/a	10 laporan	52.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Antar Lembaga	Kota Batu
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparatur terhadap pelayan administrasi perkantoran	n/a	80%	735.925.980	81%	809.518.578	82%	890.470.436	83%	979.517.479	84%	1.077.469.227	84%	1.077.469.227	Tata Usaha	Kantor kesbangpol	

			Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan perangko yang tersedia untuk mendukung proses administrasi surat menyurat	n/a	Materai 3000: 400 lbr Materai 6000: 290 lbr Perangko 1500: 140 lbr Perangko 2500: 150 lbr	4.215.000	Materai 3000: 800 lbr Materai 6000: 600 lbr Paket pengiriman: 10 paket	4.636.500	Materai 3000: 600 lbr Materai 6000: 700 lbr Paket pengiriman: 10 paket	5.100.150	Materai 3000: 600 lbr Materai 6000: 1100 lbr Paket pengiriman: 10 paket	5.610.165	Materai 3000: 800 lbr Materai 6000: 1500 lbr Paket pengiriman: 10 paket	6.171.182	Materai 3000: 800 lbr Materai 6000: 1500 lbr Paket pengiriman: 10 paket	6.171.182	Tata Usaha	Kantor kesbangpol
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang telah terbayarkan pajak tahunan tepat waktu	n/a	Mobil : 2 unit Sepeda Motor: 9 unit	3.525.000	Mobil : 4 unit Sepeda Motor: 18 unit	3.877.500	Mobil : 6 unit Sepeda Motor: 18 unit	4.265.250	Mobil : 8 unit Sepeda Motor: 36 unit	4.691.775	Mobil : 10 unit Sepeda Motor: 45 unit	5.160.953	Mobil : 10 unit Sepeda Motor: 45 unit	5.160.953	Tata Usaha	Kantor kesbangpol
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pelaksana administrasi keuangan dan tim pengadaan barang jasa yang dibayarkan honorariumnya tepat waktu	n/a	19 admin keuangan 3 pengelola barang 2 tim pengadaan barang 2 pramubakti dan 1 sopir	562.013.360	38 admin keuangan 6 pengelola barang 2 tim pengadaan barang 4 pramubakti dan 2 sopir	618.214.696	47 admin keuangan 9 pengelola barang 2 tim pengadaan barang 6 pramubakti dan 3 sopir	680.036.166	76 admin keuangan 12 pengelola barang 2 tim pengadaan barang 8 pramubakti dan 4 sopir	748.039.782	95 admin keuangan 15 pengelola barang 2 tim pengadaan barang 10 pramubakti dan 5 sopir	822.843.760	95 admin keuangan 15 pengelola barang 2 tim pengadaan barang 10 pramubakti dan 5 sopir	822.843.760	Tata Usaha	Kantor kesbangpol
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ketersediaan alat tulis yang mendukung administrasi perkantoran	n/a	43 jenis	27.510.000	86 jenis	30.261.000	129 jenis	33.287.100	172 jenis	36.615.810	215 jenis	40.277.391	215 jenis	40.277.391	Tata Usaha	Kantor kesbangpol
			Penyediaan barang cetak dan pengadaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan barang pengadaan	n/a	3 Jenis	17.566.500	6 Jenis	19.323.150	9 Jenis	21.255.465	12 Jenis	23.381.012	15 Jenis	25.719.113	15 Jenis	25.719.113	Tata Usaha	Kantor kesbangpol
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ketersediaan peralatan	n/a	15 Jenis	4.726.000	30 Jenis	5.198.600	45 Jenis	5.718.460	60 Jenis	6.290.306	75 Jenis	6.919.337	75 Jenis	6.919.337	Tata Usaha	Kantor kesbangpol

				kebersihan dan bahan pembersih															
			Penyediaan bahan Bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah surat kabar nasional dan lokal yang tersedia	n/a	3 surat kabar selama 12 bulan	3.820.320	6 surat kabar selama 24 bulan	4.202.352	9 surat kabar selama 36 bulan	4.622.587	12 surat kabar selama 48 bulan	5.084.846	15 surat kabar selama 60 bulan	5.593.331	15 surat kabar selama 60 bulan	5.593.331	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan mamim harian pegawai dan tamu	n/a	12 Jenis	12.842.800	24 Jenis	14.127.080	36 Jenis	15.539.788	48 Jenis	17.093.767	60 Jenis	18.803.143	60 Jenis	18.803.143	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dihadiri	n/a	100 kali	88.382.000	200 kali	97.220.200	300 kali	106.942.220	400 kali	117.636.442	500 kali	129.400.086	500 kali	129.400.086	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dihadiri	n/a	60 kali	11.325.000	120 kali	12.457.500	180 kali	13.703.250	240 kali	15.073.575	300 kali	16.580.933	300 kali	16.580.933	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pakaian khusus aparatur yang tersedia	n/a	100%	35.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari tertentu yang tersedia	n/a	31 stel dan 31 baju batik	35.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak digunakan	n/a	80%	161.239.000	81%	135.914.900	82%	149.506.390	83%	164.457.029	84%	180.902.732	84%	180.902.732	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah ketersediaan komputer, printer dan scanner yang tersedia	n/a	4 unit komputer 2 printer 1 scanner	67.680.000	6 unit komputer	33.000.000	8 unit komputer	36.300.000	10 unit komputer	39.930.000	12 unit komputer	43.923.000	12 unit komputer	43.923.000	Tata Usaha	Kantor kesban gpol

			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan yang mendapatkan perawatan dan perbaikan	n/a	1 Mobil	32.915.000	2 Mobil	36.206.500	3 Mobil	39.827.150	4 Mobil	43.809.865	5 Mobil	48.190.852	5 Mobil	48.190.852	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan operasional yang mendapatkan perawatan dan perbaikan	n/a	1 Mobil 8 Sepeda Motor	56.073.000	2 Mobil 16 Sepeda Motor	61.680.300	3 Mobil 16 Sepeda Motor	67.848.330	4 Mobil 24 Sepeda Motor	74.633.163	5 Mobil 32 Sepeda Motor	82.096.479	5 Mobil 32 Sepeda Motor	82.096.479	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang mendapatkan perawatan dan perbaikan	n/a	3 jenis	4.571.000	6 jenis	5.028.100	9 jenis	5.530.910	12 jenis	6.084.001	15 jenis	6.692.401	15 jenis	6.692.401	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber-Daya Aparatur	Prosentase jumlah aparatur produktif sesuai bidang tugasnya	n/a	10%	7.900.000	20%	50.000.000	30%	55.000.000	40%	60.500.000	50%	66.550.000	50%	66.550.000	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang meningkat kemampuan dan keahliannya sesuai bidang tugasnya	n/a	2 org	7.900.000	4 org	50.000.000	6 org	55.000.000	8 org	60.500.000	10 org	66.550.000	10 org	66.550.000	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD	n/a	100%	55.000.000	100%	54.000.000	100%	59.400.000	100%	65.340.000	100%	71.874.000	100%	86.874.000		
			Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Jumlah dokumen yang tersusun	n/a	1 eksemplar	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 eksemplar	15.000.000	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan hasil	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun (renja, RKA)	n/a	-	-	6 eksemplar	10.000.000	12 eksemplar	11.000.000	18 eksemplar	12.100.000	24 eksemplar	13.310.000	24 eksemplar	13.310.000	Tata Usaha	Kantor kesban gpol
TOTAL							6.370.474.600		7.669.773.060		7.853.681.516		8.639.049.668		9.502.954.634		9.502.954.634		

Ket: *) : - Program hanya dilaksanakan sampai 2018

- Kegiatan hanya dilaksanakan sampai 2018

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel T-C.28.

Tabel T-C.28.
Indikator Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun Indikator					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahu 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penanganan Potensi Kerusakan Bermotiff SARA yang diselesaikan	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun 2018-2022 merupakan gambaran yang memuat rencana program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis sangat penting artinya sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan Good Governance, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Batu (2018-2022).

Demikian Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Tahun 2018-2022 dibuat untuk digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu.

**KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU**

SULIYANAH, S.Sos

